

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
PASAR DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat unuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**ARIFATUL KIPTIYAH
NPM: 187310813**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

: Arifatul Kiptiyah

187310813

: Ilmu Pemerintahan

: Strata Satu (S1)

: Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam
Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam
ripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-
tentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karna itu dinilai
yak serta disetujui untuk diujikan dalam sidang konfrehensif.

Turut Menyetujui

am Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

ggi Ade Febrian, S.Ip.,M.Si

Pekanbaru, 8 April 2022

Pembimbing

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arifatul Kiptiyah
NPM : 187310813
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Septa Juliana, S.Sos., M.Si



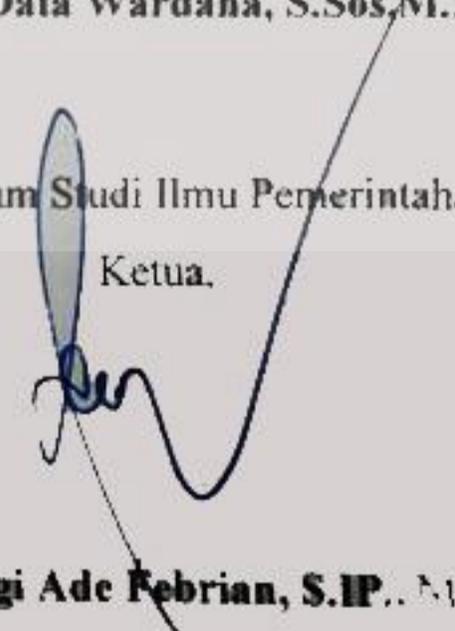
Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan 1,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan usulan penelitian ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah handa Rohmat Sani dan Ibunda Musringan, kakak, abang, adek dan Edi Kurniawan yang selalu memberi do'a, dan menyemangati tiada henti serta dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan yang sampai saat ini saling membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

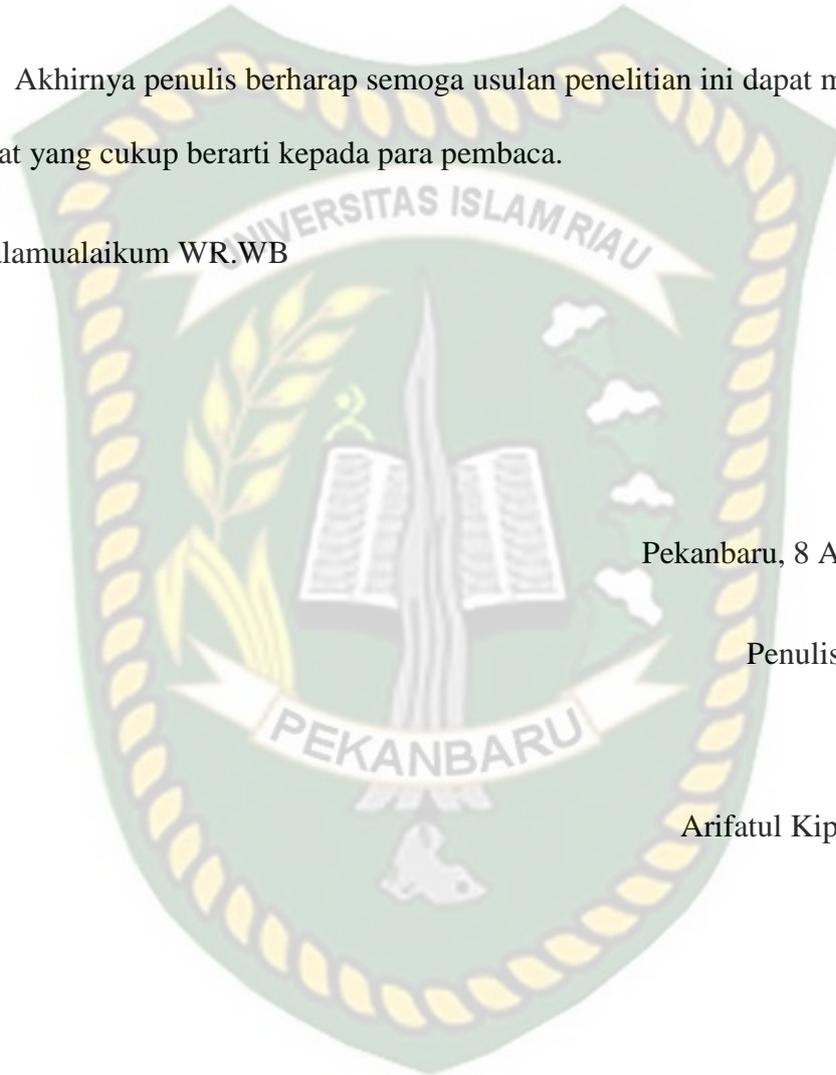
Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 8 April 2022

Penulis

Arifatul Kiptiyah



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Kebijakan	16
3. Konsep Desa.....	19
4. Konsep Pembangunan.....	21

5. Konsep Pasar	25
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikiran.....	31
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan dan Key Informan.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisi Data	43
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	45
B. Gambaran Umum Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.....	50
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muara Bahan.....	53
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	56
B. Hasil dan Penelitian.....	58
C. Hambatan-Hambatan dalam Analisis Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar	78

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan80

B. Saran.....81

DAFTAR KEPUSTAKAN

LAMPIRAN

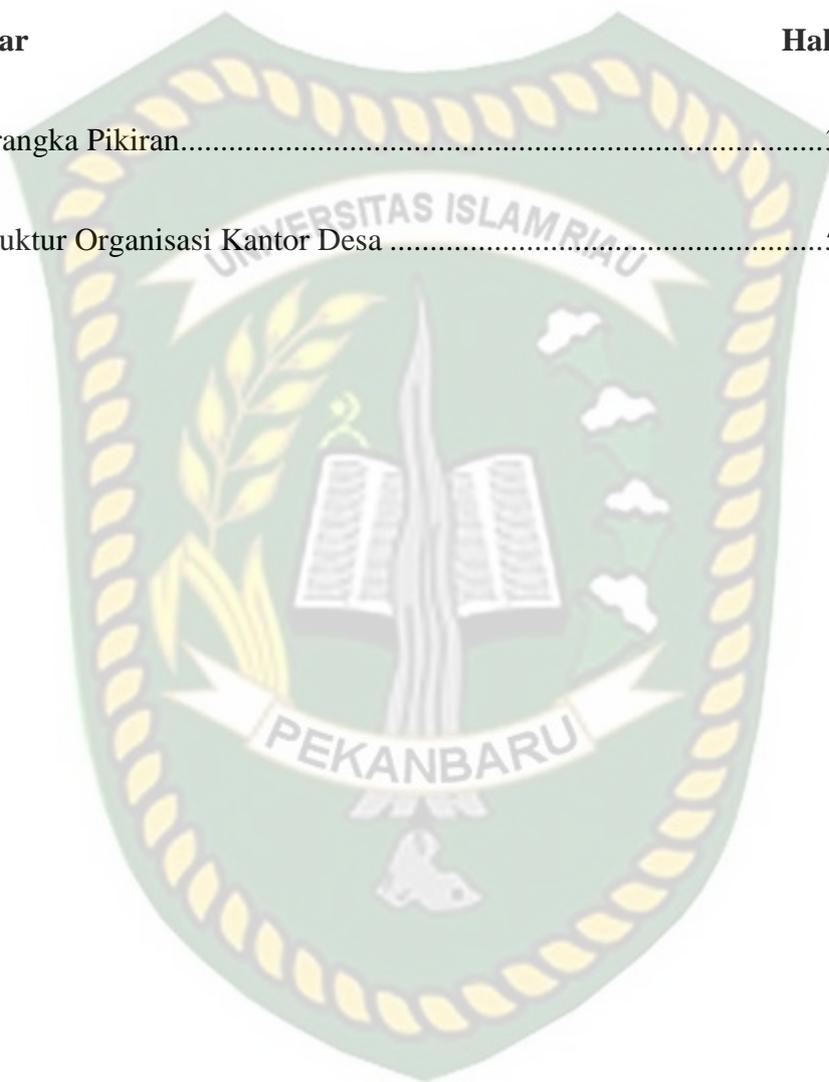


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Pasar yang ada di Kecamatan Singingi Hilir	9
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Analisis	29
Tabel II.2 Konsep Oprasional Variabel	37
Tabel III.1 Jadwal waktu dan kegiatan penelitian	43
Tabel V.1 Identitas responden berdasarkan usia.....	57
Tabel V.2 Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
11. kerangka Pikiran.....	32
1.2 Struktur Organisasi Kantor Desa	55



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifatul Kiptiyah
Npm : 187310813
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 April 2022

Penulis

Arifatul Kiptiyah

ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PASAR DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

ARIFATUL KIPTIYAH

Kata Kunci : Analisis kebijakan kepala desa dalam pembangunan pasar

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan. Adapun pasar yaitu tempat sarana dimana pusat perbelanjaan yang menyediakan keperluan yang dibutuhkan masyarakat baik dari kebutuhan sehari-hari maupun tidak, pasar juga sebagai sarana untuk berinteraksi masyarakat dengan pedagang yang ada di pasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Indikator yang digunakan meliputi ketetapan, tujuan, keputusan, proses pelaksanaan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua pembangunan, BPD, Ketua Rw 04, Ketua Rt 12 sedangkan key informannya adalah Sekdes Desa Muara Bahan. Hasil penelitian ini yaitu Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar sudah berjalan namun masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat setempat.

**POLICY ANALYSIS OF THE VILLAGE HEAD IN MARKET
DEVELOPMENT IN MUARA BAHAN VILLAGE, SINGINGI HILIR
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ABSTRACT

ARIFATUL KIPTIYAH

Keywords: Policy analysis of village heads in market development

A policy is a stipulation that contains principles to direct ways of acting that are made in a planned and consistent manner in achieving certain goals. Development is a process that is carried out in a planned manner while development is the impact caused by development. The market is a place where shopping centers provide the needs needed by the community both from daily needs or not, the market is also a means to interact with the community with traders in the market. The purpose of this study was to determine the Policy Analysis of the Village Head in Market Development. This study used a qualitative method. The indicators used include stipulations, objectives, decisions, implementation processes. The informants in this study were the Head of Development, BPD, Head of Rw 04, Head of Rt 12 while the key informant was the Village Secretary of Muara Bahan Village. The results of this study are that the Village Head Policy Analysis in Market Development has been running but there is still a lack of socialization and cooperation between village officials and the local community

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berkembang yang mana pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara merata. Sebagai wilayah yang mempunyai posisi penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia oleh karena itu wilayah-wilayah yang ada di desa perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi Negara yang lebih kuat, maju, dan mandiri. Agar dapat mencipta landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Melihat Negara Indonesia yang pada saat sekarang ini masih berkembang, pembangunan merupakan tolak ukur kemajuan sebuah bangsa dan Negara. Semakin banyaknya sebuah pembangunan di negara atau di daerah-daerah maka semakin baik kemajuan di Negara tersebut. Sehingga daerah di Indonesia akan berlomba-lomba untuk melakukan sebuah pembangunan, pada pembangunan yang berlangsung sering kali hanya mementingkan materi atau tujuan yang ingin dicapai dan sering kali melupakan bahkan meninggalkan unsur manusianya atau masyarakatnya.

Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali hanya diukur dari output secara fisik dengan menjadikan fisik sebuah ukuran. Pembangunan dinilai sudah berhasil apabila bangunan fisiknya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dan sebaliknya substansi pembangunan untuk kehidupan manusia yang lebih bagus secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya sering terlupakan. Dalam banyak kasus di sebuah pembangunan aspek sosial inilah yang banyak tidak menjadi perhatian. Bentuk kegagalan dalam pembangunan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik dan infrastruktur, walaupun dilihat dari sisi lain pembangunan fisik dan infrastruktur juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk menguatkan aspek sosial kemasyarakatan.

Pemerintah desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin Pemerintah Desa, seperti tertuang dalam pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintahan desa juga sebagai sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan,

melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah desa yaitu symbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa, pemerintah desa dilaksanakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya camat, sangat menentukan dalam pelaksanaan dan kemajuan serta perkembangan desanya.

Didalam desa mempunyai seorang pemimpin yang kita sebut juga sebagai Kepala Desa atau Kades yang mempunyai tugas dan kewajiban serta wewenang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari undang-undang tersebut kepala desa di berikan amanat untuk melaksanakan pembangunan desa.

Setelah peraturan undang-undang Desa disahkan, maka hukum tentang eksistensi desa menjadi semakin kuat karena desa sendiri diatur berdasarkan asas rekognisi, subsidiritas, kemandirian, partisipasi, kesertaan pemberdayaan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 (UUD) tentang pedoman-pedoman pembangunan desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:

- 1) Tambahan perahu
 - 2) Jalanan pemukiman
 - 3) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
 - 4) Pembangkit listrik tengah mikrohidro
 - 5) Lingkungan pemukiman masyarakat desa
 - 6) **Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.**
- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
- 1) Air bersih bersekala desa
 - 2) Sanitasi lingkungan
 - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

Rencana pembangunan merupakan suatu pengarahannya untuk menghasilkan sebuah rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilakukan pada unsur penyelenggaraan baik dari Negara maupun masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Pada hakekatnya sebuah pembangunan harus menggambarkan perubahan maksimal secara menyeluruh dan tidak menghiraukan keanekaragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu ataupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya, untuk tetap bergerak agar mampu mencapai kondisi kehidupan yang

lebih baik, baik secara material maupun spiritual. Untuk proses sebuah pembangunan yang selalu menunjukkan gejala meningkat.

Adapun Syarat dalam mendirikan pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pengelola. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Wajib miliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mendapatkan persetujuan dari warga setempat.
- b. Harus miliki bangunan yang layak digunakan, lokasi bersih dan area parkir kendaraan tidak mengganggu lingkungan atau jalan, serta ada persetujuan dari masyarakat setempat.

Belum berjalannya pasar yang sudah dibangun di desa muara bahan kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singingi karena masih adanya masyarakat yang belum setuju mengenai pembangunan pasar tersebut

Adapun peraturan desa Muara Bahan tentang Izin Mendirikan Bangunan “Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Izin mendirikan bangunan.”

Koryati (dalam Mustari 2015; 7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat di katakan sebagai rumusam keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Adapun kebijakan yang di keluarkan kepala desa dalam pembangunan pasar sebagai berikut :

- a. Tempat parkir
- b. Los-los pasar

Dan peraturan menteri desa Muara Bahan tentang pembangunan “Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang indeks pembangunan pasar”

Pengelolaan pasar tradisional atau pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2014, tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko dan swalayan.

Adapun pembangunan pasar yang di lakukan di Desa Muara Bahan merupakan pasar Tradisional. Pasar Tradisional yaitu pasar yang melakukan transaksi secara langsung dan ada proses tawar menawar. Barang yang diperjualbelikan pun merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat

Di dalam Pemerintahan mempunyai Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum berikut adalah 3 urusan tersebut :

- a) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- b) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- c) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintahan mempunyai fungsi Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pemerintah memiliki fungsi pokok atau pelayanan sebagai penyedia pelayanan baik swasta maupun publik, termasuk pelayanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau pemberdayaan sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Rasyid (dalam Labolo,2014: 34) memiliki pendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga segala aktifitas berlangsung secara kondusif dan tercipta tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan setelah itu akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Fungsi pemberdayaan, yaitu mengarahkan masyarakat untuk mandiri agar tercipta keemakmuran dalam masyarakat.
- d. Fungsi pembangunan, yaitu jika terdapat pemberdayaan, maka secara tidak langsung terciptanya pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintahan serta keterbatasan yang dimiliki pemerintahan hal itu membuat masyarakat secara perlahan dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhan

Adapun beberapa fenomena mengenai Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muarabahan Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya pendekatan antara aparat desa kepada masyarakat untuk bermusyawarah membahas atau merencanakan sebuah pembangunan pasar di Desa Muarabahan
2. Terindikasi kurangnya partisipasi masyarakat dan hambatan pada alokasi dana untuk pembangunan pasar tersebut

Dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan judul “Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muarabahan Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

Tabel 1.1 Tabel Pasar yang ada di Kecamatan Singingi Hilir adalah sebagai berikut :

NO	DESA	HARI
1.	SUNGAI BULUH	Minggu
2.	SIMPANG RAYA	Rabu
3.	MUARABAHAN	X
4.	SUMBER JAYA	Selasa
5.	SUKA DAMAI	X
6.	BUKIT RAYA	Sabtu
7.	BIRINGIN JAYA	Rabu
8.	SUKAMAJU	Minggu/Senin
9.	KOTO BARU	Senin/Kamis
10.	PETAI	Kamis
11.	SUNGAI PAKU	Jum'at
12.	TANJUNG PAUH	Rabu

Sumber : Olahan Penulis 2021

Berdasarkan dari 12 tabel di atas Penulis akan meneliti di Desa Muarabahan karena di Desa tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis teliti sebagai bahan Usulan Penelitian ini.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kontor desa Muara Bahan jumlah penduduk yang ada di Desa Muara Bahan yaitu berjumlah 3233 jiwa dengan 1669 jiwa penduduk laki-laki dan 1564 jiwa penduduk perempuan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut “Bagaimanakah Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Alokasi dana desa dalam pembangunan pasar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi perbandingan, informasi, dan untuk menambah wawasan bagi pembaca perihal Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lainnya pada masa yang akan datang berdasarkan judul Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian dapat berguna untuk menjadi sumbangan dan meningkatkan kemampuan berfikir bagi penulis dan pihak-pihak lainnya dalam menggunakan teori-teori yang di dapat semasa kuliah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan konsep dan kaidah hukum yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti untuk menjelaskan secara singkat tujuan penelitian, baik dalam buku akademik, laporan penelitian, disertasi, esai akademik, dan lain-lain. Tersedia secara tertulis dan melalui media elektronik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Munaf (dalam Labolo, 2011;47) Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek nasional material, sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, tetapi dalam paradigma baru, pemerintah dianggap objek material dalam masyarakat, sehingga proses dimana pemerintah hidup oleh rakyat pemerintah dan negara.

Ndara (Labolo, 2011; 34) menyatakan bahwa pemerintah adalah suatu badan atau badan pemerintah yang bertindak sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemerintah. Di sisi lain, menurut Mauridiah (2014; 1), pemerintah adalah badan organisasi yang memberikan legitimasi atau dukungan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan memiliki empat fungsi. Fungsi utamanya adalah fungsi pelayanan pemerintah dan pelayanan pembangunan. Fitur, dan Fitur Layanan Masyarakat, dan Layanan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu menurut, Ndraha (2011;5) pemerintah bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kebutuhan yang diatur untuk publik dan pelayanan publik, tuntutan yang dipesan berdasarkan lokasi mereka seperti, ini adalah multi-proses sistem. Menjadi pelanggan atau pelanggan yang tidak berdaya.

Menurut Davay (dalam Tahir, 2007: 53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyediaan layanan
- b. Pengaturan
- c. Pembangunan
- d. Perwakilan
- e. Koordinasi dan perencanaan.

Sedangkan menurut sumardi (dalam Ndraha, 2010;18) mengelompokan pemerintah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah kewenangan untuk memerintah dari lembaga politik.
2. Pejabat yang merupakan instansi pemerintah yang mempertahankan dan menjalankan kekuasaan
3. Kekuasaan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengatur masyarakat.
4. Lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan seperti undang-undang untuk mengawasi masalah pemerintahan dengan kekuasaan yang sah.

Secara etimologi menurut Syafie (2007;4) pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Ketertiban berarti melakukan pekerjaan ketertiban antara yang berwibawa, yaitu pemerintah dan yang taat, yaitu yang diperintah.

2. Tambahkan awalan "pe" dan itu akan menjadi pemerintah. Artinya lembaga atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kewenangan untuk memerintah.
3. Menambahkan akhiran "untuk" membuatnya menjadi pemerintah. Ini berarti tindakan, metode, atau bisnis dari suatu organisasi yang memiliki kekuatan untuk mengatur.

Pemerintah berasal dari kata "order", penambahan awalan "pe" menjadikannya "pemerintah", dan penambahan akhiran "an" menjadikannya "pemerintah". Dalam hal ini, perbedaan antara "pemerintah" dan "pemerintah" adalah: Dari jumlah tersebut, pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang relevan, yang berarti masalah atau masalah pemerintah itu sendiri (Syafiie, 2011;5).

Akar kata "perintah" mengandung setidaknya empat elemen penting, sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Partai penguasa pertama disebut penguasa atau pemerintah
- c. Dua partai atau orang yang berkuasa
- d. Ada hubungan antara kedua belah pihak. (Syafiie, 2011; 5)

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa konsep dan definisi tentang pemerintahan yang telah dijelaskan di atas, menurut Kitab Suci Al-Qur'an (dalam Syafiie 2013; 12) yang menjelaskan bahwa pemerintahan adalah golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang hal-hal yang buruk, dan itulah orang-orang yang beruntung.

Di dalam Pemerintahan mempunyai Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum berikut adalah 3 urusan tersebut :

- d) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- e) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- f) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah memiliki fungsi Dari Ndraha (2001: 85), fungsi pemerintahan diringkas menjadi dua jenis fungsi.

1. Pemerintah memiliki fungsi pokok atau pelayanan sebagai penyedia pelayanan baik swasta maupun publik, termasuk pelayanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau pemberdayaan sebagai penyelenggara pembangunan dan melaksanakan program pemberdayaan

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Rasyid (dalam Labolo,2014: 34) memiliki pendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yaitu :

- e. Fungsi pengaturan, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga segala aktifitas berlangsung secara kondusif dan tercipta tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
- f. Fungsi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan setelah itu akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.
- g. Fungsi pemberdayaan, yaitu mengarahkan masyarakat untuk mandiri agar tercipta keemakmuran dalam masyarakat.

- h. Fungsi pembangunan, yaitu jika terdapat pemberdayaan, maka secara tidak langsung terciptanya pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan serta keterbatasan yang dimiliki pemerintahan hal itu membuat masyarakat secara perlahan dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhan.

2. Konsep Kebijakan

Sebagai pemerintah tentunya mempunyai wewenang untuk memberikan berbagai macam kebijakan agar program-program baik dari program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan maupun tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Suharto (dalam Subarsono 2005: 7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut partowidagdo dalam anwar (dalam Subarsono 2011: 42) Model kebijakannya adalah bantuan rekonstruksi untuk bantuan rekonstruksi, secara imajinatif mengorganisasikan dan menafsirkan pengalaman dari situasi masalah, menjelaskan, menjelaskan, dan meramalkan aspek-aspek dengan tujuan memecahkan masalah. Kebijakan publik adalah proses yang kompleks, jadi kami akan menggunakan yang pertama. Oleh karena itu, sifat model yang menyederhanakan realitas sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks ini. Kedua, kodrat manusia tidak dapat memahami realitas yang kompleks tanpa terlebih dahulu menyederhanakannya.

Koryati (dalam Mustari 2015; 7) mengatakan politik secara umum dapat digambarkan sebagai formula keputusan pemerintah yang berfungsi sebagai kode etik untuk menangani masalah publik yang memiliki tujuan, rencana, dan program yang jelas yang perlu dilaksanakan.

Kebijakan adalah ketentuan yang harus digunakan oleh suatu badan usaha atau instansi pemerintah sebagai petunjuk, pedoman, atau petunjuk untuk berjalan secara lancar dan terpadu guna mencapai suatu tujuan tertentu. (Kansil dan Christine 2008: 190).

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003 : 3) menyatakan bahwa *“Publik policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Bullock et al (Angga Sahya, Endang Soetari 2014) Untuk disebut kebijakan, setelah mengambil keputusan, Anda perlu menerapkan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep, politik meliputi:

- a. Peraturan dan kebijakan mengandung klausula yang mempunyai efek mengikat baik di dalam maupun di luar pembuat kebijakan.
- b. Tujuan dari adanya suatu kebijakan adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau mengatasi suatu masalah tertentu.
- c. Putuskan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak.
- d. Proses mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan.

Menurut Syafiie (dalam Syafiie 2011; 150) menyebutkan : “ Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”. Menurut laswell, kebijakan adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nilai dan aspek. (dalam lubis, 2007: 19)

Menurut Amra, kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. (dalam lubis, 2007: 7). Sedangkan Stoner (dalam Kansil 2003 : 190), mendefinisikan kebijakan adalah suatu strategi atau langkah-langkah yang di ambil dan di laksanakan dalam mencapai tujuan atau suatu maksud.

Kebijakan menurut Wahab (2004 : 3) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

3. Konsep Desa

Istilah desa sering kali identic dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (dalam Misbahul Anwar 2012).

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (undang-undang tentang Desa : 2014 :8-12), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Didalam desa mempunyai seorang pemimpin yang kita sebut juga sebagai Kepala Desa atau Kades yang mempunyai tugas dan kewajiban serta wewenang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari undang-undang tersebut kepala desa di berikan amanat untuk melaksanakan pembangunan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rauf 2016) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap

dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan dan lain sebagainya memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya menurut Sastramihardja (Nain, 2019; 3) menyatakan bahwa desa merupakan suatu system social yang melakukan sebuah fungsi internal yaitu mengarah pada pengorganisasian komponen-komponennya dan juga keseluruhannya merupakan satu system yang bulat dan mantap. Disamping itu juga fungsi eksternal dari system social antara lain yaitu proses-proses social dan tindakan-tindakan system social tersebut dapat menyesuaikan diri ataupun mengulangi suatu situasi yang di hadapinya. Sistem social tersebut juga mempunyai beberapa elemen-elemen yaitu tujuan, kepercayaan, perasaan, norma, status peran, kekuasaan, derajat atau lapisan social, fasilitas dan wilayah.

Kemudian menurut pendapat Widjaja (2012: 3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam tentang pemikiran desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri secara relative mandiri.

Kementerian Dalam Negeri (Wasistiono dan Tahrir 2006:8) mempertimbangkan kembali makna desa. Artinya, mulai dari desa atau nama asli

hingga satuan kelurahan, susunan aslinya berbadan hukum, dan ada juga beberapa instansi pemerintah di dalam atau di sekitar daerah pengamatan. Menurut Sunardjo (Wasistono dan Tahir, 2006: 9), desa menyatakan kotamadya berdasarkan undang-undang, berdasarkan nada dua hukum adat yang menetapkan batas-batas di wilayah tertentu. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama, menempati wilayah, dan memiliki hak satu sama lain.

4. Konsep Pembangunan

Menurut Soekanto (2006 : 356) “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Menurut Riyadi (2005 : 5) “Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan.

Sedangkan menurut Rogers (Agus Suryono 2001; 132), pembangunan adalah partisipasi masyarakat secara luas dalam masyarakat menuju kemajuan sosial dan material, termasuk peningkatan keadilan, kebebasan, dan kualitas berharga lainnya, itu adalah proses perubahan. Memiliki kontrol lebih besar atas apa yang mereka dapatkan dari lingkungan mereka. Yang dimaksud dengan pembangunan sarana fisik adalah sarana atau fasilitas yang secara langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara sebagai berikut:

- a. Prasarana pembangunan yaitu: jalan, jembatan dan lainnya
- b. Pemasaran yaitu: gedung, pasar.

- c. Prasarana social yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
- d. Prasarana produksi saluran air

Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik lagi untuk menggerakkan manusia baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasil hasilnya.

Menurut Mohammad ali (2009), pembangunan merupakan setiap upaya yang di kerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk melaksanakan dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang di lakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global (solihin, 2002, 111).

Ada tiga prinsip pokok pembangunan desa yaitu :

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan, trilogy pembangunan, ketiga unsur trilogy pembangunan tersebut adalah :
 - a. Perkembangan dan hasil yang adil.
 - b. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis ditentukan secara terpadu oleh semua sektor, termasuk desa dan kota di setiap wilayah, serta dikembangkan secara serasi dan terpadu.
1. Pembangunan desa di lakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

masyarakat setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan di samping itu setiap desa memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

2. Meningkatkan efisiensi sosial semaksimal mungkin melalui kebijakan deregulasi, desentralisasi, dan desentralisasi.

Selanjutnya menurut Siagian (2005; 9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan..

Kemudian menurut Galtung (dalam Trijono, 2007: 3) Pembangunan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara yang tidak merugikan kehidupan sosial atau lingkungan alam.

Katr (Yuwono, 2001: 47), sebaliknya, menggambarkan perkembangan besar dari apa yang dianggap lebih berharga. Secara umum, tujuan pembangunan

adalah pembangunan nasional atau pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, peningkatan kesejahteraan manusia merupakan fokus utama pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan masyarakat menentukan tujuan, sumber pengawasan, dan arah proses pelaksanaan pembangunan, dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Menurut Effendi (2002 : 2) pembangunan adalah “suatu upaya peningkatan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini pembangunan ditujukan pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi utama, dengan tujuan membuka wawasan dan kesadaran masyarakat menuju arah dan cita-cita yang lebih baik.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya kolaboratif untuk menciptakan alternatif yang lebih sah bagi setiap warga negara untuk mencapai dan mencapai keinginannya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004: 67). Seher menekankan tujuan pembangunan dalam tiga hal: pembangunan yang adil dan terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Sudjana, 2004: 178).

Dan peraturan menteri desa Muara Bahan tentang pembangunan “Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang indeks pembangunan pasar”

5. Konsep Pasar

Pasar adalah tempat sarana dimana pusat perbelanjaan yang menyediakan keperluan yang dibutuhkan masyarakat baik dari kebutuhan sehari-hari maupun tidak, pasar juga sebagai sarana untuk berinteraksi masyarakat dengan pedagang yang ada di pasar.

Menurut Wikipedia 2014 (*id.wikipedia.org*), Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik untuk memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja di bangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang menjadi- atau- dari-komunitas kecil, kota dan kota.

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli. Secara umum, pasar berate tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang di lakukan oleh penjual dan pembeli yang di terjadi pada waktu tertentu.

Selanjutnya menurut Sukirno (2003:25) pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Secara umum pasar di bedakan atas pasar tradisional dan pasar modern. Sukirno (2003 : 227-326) terdapat struktur atau bentuk-bentuk pasar yang dapat di bedakan atas pasar monopoli, pasar persaingan monopolistic, pasar oligopoly dan pasar duopoly

Sedangkan menurut Tati Suhartati Joessron (2003) pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya di gunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Sedangkan menurut Hendri Ma'ruf (Etty Indriati. 2013) mendefinisikan bahwa kata pasar memiliki tiga pengertian, yaitu pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat pertemuannya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran”, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi jual beli. Pasar dalam arti sekompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli”.

Pasar dalam Islam, adalah pasar yang didalamnya di terapkan nilai-nilai islam, seperti jual beli yang sah menurut syarah'haru memiliki rujun dan syarat

yang sesuai dengan islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad, ma'kud alaih (barang yang di perjual belikan) serta terdapat nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat subjek (orang yang berakad adalah : berakal (baligh dan dewasa) tanpa paksaan (sama-sama rela) mumayiz, sedangkan syarat barang yang diperjual belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut syara', tidak di tablikan, serta barang tersebut milik sendiri (Nizaruddin : 2013)

a. Segi ekonomi

Merupakan sebuah lokasi transaksi dimana ada penjual dan pembeli ialah produsen dan konsumen yang merupakan komoditas karena pasar sebagai wadah untuk bertransaksi berlangsung dan sebagai demand, suplai selain itu juga sebagai pendapatan ekonomi Negara misalnya dari pajak pasar.

b. Segi sosial budaya

Merupakan suatu tradisi masyarakat ataupun sudah menjadi kebiasaan secara social untuk saling berinteraksi antara komunitas pada sector informal dan formal atau biasa di sebut juga dengan penjual dan pembeli.

c. Segi arsitektur.

Melihatkan bangunan dan lokasi atau tempat di setiap daerah itu berbeda-beda baik di lihat dari segi bentuk bangunan dan lainnya ada bangunan yang biasa ada juga yang sedikit unik, berada diatas permukaan air yaitu pasar terapung yang menggunakan sampan atau perahu.

Adapun Syarat dalam mendirikan pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pengelola. Diantaranya sebagai berikut :

- c. Wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mendapatkan persetujuan dari warga setempat.

- d. Harus memiliki bangunan yang layak digunakan, lokasi bersih dan area parkir kendaraan tidak mengganggu lingkungan atau jalan, serta ada persetujuan dari masyarakat setempat.

Adapun peraturan desa Muara Bahan tentang Izin Mendirikan Bangunan “Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Izin mendirikan bangunan.”

Pengelolaan pasar tradisional atau pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2014, tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko dan swalayan.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan salah satu tumpuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muarabahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memahami bahwa ada beberapa penelitian yang menganggap judul penulis sebagai sarana bahan penelitian. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian terkait dengan judul penulis. Berikut penulis lampirkan beberapa penelitian:

Tabel II.I Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Analisis

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Ina Laelatu Toyibah	Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas)	Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama- sama menggunakan judul analisis dan dalam pembahasan ini sama-sama membahas tentang pasar	Perbedaan dari penelitian ini ialah perbedaan tempat penelitian, Desa Patikraja Kecamatan Patiraja Kabupaten Banyumas Dan penelitian saya Di Desa Muara Bahan Kabupaten Kuantan Singingi
2	Abdul Hakim	Analisi Pengaruh Pembangunan Pasar Sanggam Aji Dilayas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Gunung Tabur Kabupaten Berau	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan pasar	Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif Sedangkan Penelitian saya menggunakan penelitian Kualitatif
3	Ristya Arinta Safitri	Pembangunan Pasar Vs Komunitas	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat

			membahas tentang pembangunan pasar	penelitian, Kabupaten Kulon Progo Dan penelitian saya Di Desa Muara Bahan Kabupaten Kuantan Singingi
4	Ni Komang Devayanti Dewi	Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Di Era Liberalisasi Perdagangan	Persamaan dari Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasar	Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative
5	Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto	Revitalisasi pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)	Persamaan dari Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasar dan sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah perbedaan tempat penelitian, Pasar tumpang Kab.Malang Dan penelitian saya terdapat Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir

Sumber : Olahan Penulis 2021

Dilihat dari tabel penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan referensi di dalam penelitian ini, jadi dapat penulis jabarkan persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti berbeda. Adapun

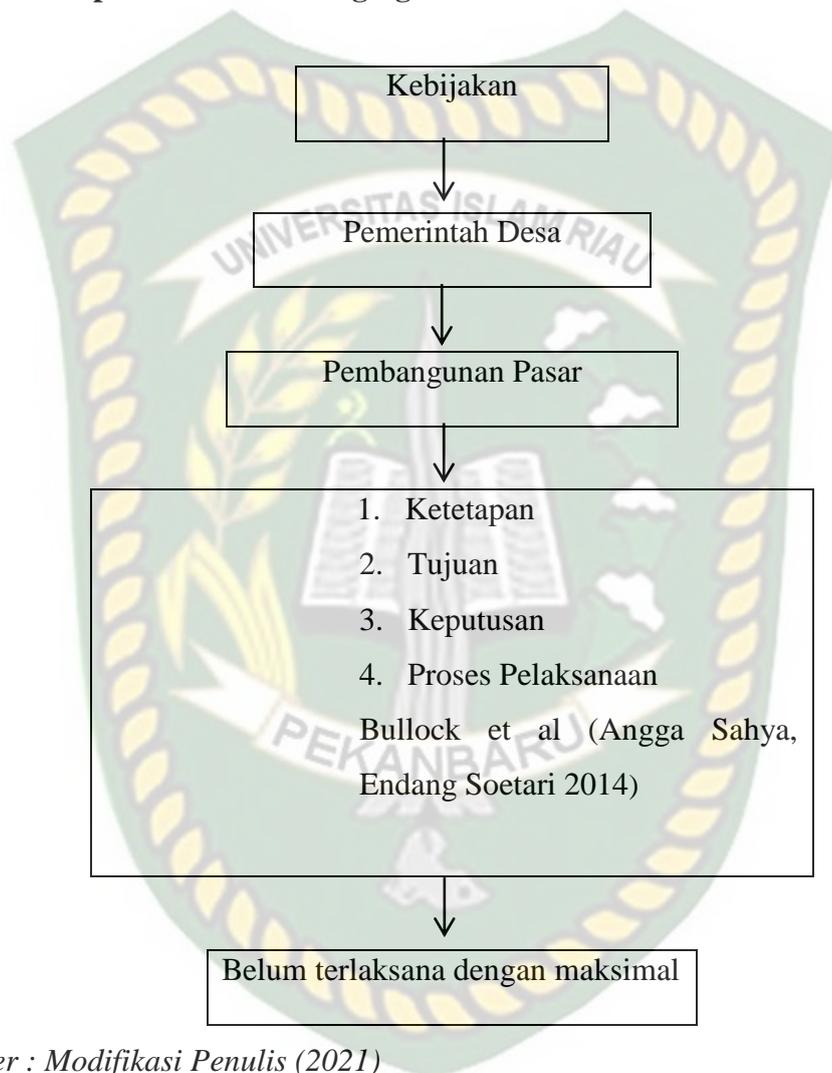
yang membedakan adalah dari penelitian ini penulis memfokuskan kepada Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek kebijakan kepala desa dalam pembangunan pasar di desa muara bahan kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing.

Menurut Sugiyono (2017: 60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model spiritual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penulis (2021)

D. Konsep Oprasional

Mengenai konsep oprasional di dalam penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan penuh dan mempunyai kewenangan untuk membuat,menerapkan peraturan-peraturan sebagai pemenuh kebutuhan hidup ataupun urusan-urusan umum masyarakat di suatu wilayah, adapun pemerintahan sebagai cara pemerintah untuk menjalankan kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam urusan pembangunan di suatu wilayah.
2. Kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatkan pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks , karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

3. Desa merupakan suatu system social yang melakukan sebuah fungsi internal yaitu mengarah pada pengorganisasian komponen-komponennya dan juga keseluruhannya merupakan satu system yang bulat dan mantap. Disamping itu juga fungsi eksternal dari system social antara lain yaitu proses-proses social dan tindakan-tindakan system social tersebut dapat menyesuaikan diri ataupun mengulangi suatu situasi yang di hadapinya. Sistem social tersebut juga mempunyai beberapa elemen-elemen yaitu tujuan, kepercayaan, perasaan, norma, status peran, kekuasaan, derajat atau lapisan social, fasilitas dan wilayah.
4. Pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.
5. Pasar adalah tempat sarana dimana pusat perbelanjaan yang menyediakan keperluan yang dibutuhkan masyarakat baik dari

kebutuhan sehari-hari maupun tidak, pasar juga sebagai sarana untuk berinteraksi masyarakat dengan pedagang yang ada di pasar.

pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik untuk memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja di bangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

E. Oprasional Variabel

Oprasional merupakan batasan atau rincian-rincian suatu kegiatan untuk mengukur variable penelitian yang boleh di ukur dan tanda-tanda yang memberikan arti pada variabel tertentu. Agar memudahkan analisa mendapat pengetahuan, maka dari itu penulis memperjelas berhubungan dengan konsep yang akan di operasionalkan di dalam penelitian ini dan dapat di lihat konsep oprasional sebagai berikut:

Tabel II.2 : Konsep Oprasional Variabel Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Untuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan. Oleh karena itu, kebijakan sebagai suatu konsep meliputi beberapa hal sebagai berikut</p> <p>Menurut Bullock et al (Angga Sahya, Endang Soetari 2014)</p>	Analisis Kebijakan	<p>1. Ketetapan</p> <p>2. Tujuan.</p> <p>3. Keputusan</p> <p>4. Proses pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Pembagian tugas yang ada dipasar • Apa saja langkah-langkah pembangunan pasar • Apakah tuju dari pembangunan pasar • Bagaimana mekanisme Perencanaan pasar • Apakah keputusan peraturan sangat berpengaruh dalam pembangunan pasar • Bagaimana Proses pelaksanaan

			pendekatan <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan berlangsung
--	--	--	--

Sumber : Olahan Penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Creswell (2010 : 4-5) Penelitian kualitatif adalah cara untuk menyelidiki dan memahami implikasi dari individu atau kelompok yang berbeda yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya kunci seperti menanya dan pertanyaan prosedural, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data induktif dari mata pelajaran khusus ke mata pelajaran umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Orang-orang yang terlibat dalam bentuk penelitian ini perlu mengadopsi perspektif penelitian induktif yang berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas masalah. Studi kualitatif ini membantu peneliti memahami isu-isu sentral masyarakat dengan menyelidiki semua isu yang muncul dan mempengaruhi masyarakat.

Sedangkan menurut Moleong (2011: 6) Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki fenomena apa yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perilaku lain yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis aktor yang diamati. Dan Sugishiro (2018: 8) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif disebut juga metode artistik karena penelitiannya lebih bersifat artistik, dan disebut juga metode interpretatif karena data yang diperoleh berkaitan dengan data di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami dan memahami apa yang sulit dipahami dan yang tidak dapat ditemukan jawaban atas

fenomena tersebut. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan data dalam bentuk kitab suci yang lebih mudah dipahami.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus (Case Study) Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell. Jenis pendekatan Studi kasus ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang sudah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah dapat diselesaikan.

Susilo Rahardjo dan Gudnanto 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Adapun yang membedakan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif lainnya terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dari penelitain ini maka penelitian ini akan di laksanakan di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan mengapa di lakukannya penelitian di Desa Muara Bahan karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang dari segi pembangunannya belum merata di Kecamatan Singingi Hilir.

C. Informan dan Key Informan

Menurut Sugiyono (2016 :300), Identifikasi informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah target sampling. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan metode target sampling, yaitu metode pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan mencurigakan tertentu terkait dengan pilihan sumber data atau orang yang mungkin penting untuk mengetahui apa yang diharapkan.

Sedangkan menurut Meleong 2015 : 163) Informan penelitian adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Key informan merunut Meleong (2005:3) Adalah orang yang tidak hanya dapat memberikan informasi kepada penulis, tetapi juga merupakan sarana untuk mendukung sumber bukti yang berkaitan dengan penelitian, sehingga informan utama paling mengetahui informasi yang berkaitan dengan pengetahuannya tentang penelitian tersebut. mereka adalah orang-orang yang.

Didalam penelitian ini agar mendapat informasi yang lebih akurat dan jelas, peneliti menggunakan *purposive sumpling* di karenakan teknik dalam pemilihan informan adalah yang mempunyai informasi yang di perlukan terhadap penelitian Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muarabahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sekdes di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir (Key Informan).
2. BPD / Badan Permusyawaratan Desa (Informan)
3. Ketua Pelaksanaan Pembangunan (Informan)
4. Masyarakat di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir (Informan).

D. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini untuk mendapat informasi yang baik, jenis data yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh malalui wawancara atau secara langsung yang di lakukan oleh penulis dari semua responden yang sudah di persiapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan

2. Data Skunder

Adalah data yang di dapat dari pengumpulan data atau data tertulis yang sudah diolah terlebih dahulu untuk melengkapi data primer yang di dapatkan dari

informan penelitian baik didapat dari instansi ataupun lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapat informasi yang lebih jelas dan akurat, maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut ini :

1. Teknik Wawancara (*Intevew*)

Sebagaimana yang kita ketahui selama ini wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara komunikasi secara langsung, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan agar mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

Menurut Tersiana (2018 : 12), wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang di teliti. Dalam pelaksanaan wawancara, agar pokok-pokok permasalahan terarah, penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur.

Ada beberapa macam cara wawancara menurut Patton (dalam Moeloeng, 2013) :

- a. Wawancara pembicaraan informal (yaitu mengajukan pertanyaan yang bergantung kepada pewawancara)
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara (yaitu menggunakan pedoman dalam wawancara)
- c. Wawancara baku terbuka (yaitu menggunakan pertanyaan yang baku)

2. Observasi

Observasi adalah sebuah penelitian yang di lakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan terhadap objek penelitian agar mengetahui kejadian yang sebenarnya untuk melihat fakta social agar dapat disamakan dengan hasil wawancara atau informasi dengan data dilapangan mengenai penelitian ini.

Menurut (Morissan, 2017 :143) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang di amati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah langkah untuk memproses data menjadi informasi. Saat melakukan sebuah penelitian karena diperlukannya menganalisis sebuah data agar dapat dengan mudah di pahami menganalisis sebuah data juga sangat di perlukan agar peneliti mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dikerjakan untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Menurut Sugiyono (2010 : 335), yang di maksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian penelitian Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muarabahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan dan Penyusunan Up						
2	seminar up						
3	Riset						
4	Penelitian Lapangan						
5	Pengelolaan dan analisi Data						
6	konsultasi dan Bimbingan Skripsi						
7	ujian skripsi						
8	revisi dan Pengesahan Skripsi						
9	Penyerahan Skripsi						

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi yang secara geografis, geopolitik dan geopolitik terletak di jalur tengah melalui pulau Sumatera di Riau bagian selatan, memainkan peran strategis sebagai hub komersial yang menghubungkan kawasan manufaktur dan pelabuhan, khususnya pelabuhan Kuaraenok. Dengan demikian, Kabupaten Kuantan Singingi berpeluang untuk mengembangkan sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi, perbankan dan pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indra Gili Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Peralawan Nomor 53 Tahun 1999. Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7.656,03 km² yang terletak antara 0°00- 1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 Bujur Timur.

Adapun batasan-batasan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Sebelah Utara berdasarkan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dilihat dari batas-batas Kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1.1 Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tersusun atas sesar naik, sesar terkonservasi, dan lipatan yang terdiri dari kelompok pendukung sedimen, metamorfisme (Mariha), relief vulkanis dan intrusif serta sedimen permukaan meningkat. Selain itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

1.2 Hidrografi

Ada 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan/Indragiri dan Sungai Singingi. Peran sungai sangat penting, terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya, dan sumber daya buatan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Daerah aliran sungai (DAS) sungai Kuantan mengalir 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengan, Kecamatan Benai, Kecamatan pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kuantan Cerenti.

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 53

Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defetif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/ Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuatan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai

Sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H Rusdji S Abrus pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan H. Asrul Ja'araf periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negri 131.23-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan wakil Kabupaten Kuantan Singingi terpilih meninggal Dunia dan sebagai wakil bupati di tetapkan sebagai bupati berdasarkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negri Nomor : 131.24-316 pada tanggal 20 agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Kecamatan yang baru di mekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Singingi Hilir
4. Kecamatan Pangean
5. Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Kecamatan Inuman
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Pucuk Rantau
9. Kecamatan Sentajo Raya
10. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
11. Kecamatan Benai
12. Kecamatan Cerenti
13. Kecamatan Singingi
14. Kecamatan Kuantan Hilir
15. Kecamatan Kuantan Tengah

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs.H. Rusdji S Abrus periode 2000-2001
2. Drs Asrul Ja'raf periode 2001-2006
3. H. Sukarmis periode 2006-2016
4. Drs. H.Mursini, M.Si periode 2016-2021
5. Andi Putra SH.,MH periode 2021-2021
6. Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M Periode 2021- sekarang

Beriring dengan berhembusnya “angin reformasi” membuat perubahan-perubahan yang cukup drastis kepada negeri ini, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu bentuknya yaitu dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2001

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Visi

“terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religious,cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera“ (KUANTAN BERCAAYA).

Misi

1. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi .
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/daerah.
4. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dankepekaan aparat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahannya di Kabpaten Kuantan Ssingingi.

6. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
8. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustry dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
9. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public.
10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Gambaran Umum Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.

1. Kondisi Dasa dan Sejarah Singkat Desa

Awal mulanya di Desa Muara Bahan, sama seperti 12 desa ekstrasmigrasi yang pada waktu itu berada di Kecamatan Singingi Indragiri Hulu. Merupakan hutan belantara yang digarap oleh masyarakat sebagai ladang dimana pola tanam berubah, sebagaimana kebiasaan hidup masyarakat pada saat itu, akibat adanya program pemerintahan orde baru ini di kecamatan Singingi Indragiri Purna pada waktu itu. Suatu sistem yang membubarkan penduduk dengan melakukan perpindahan penduduk dari daerah berpenduduk padat dan pulau-pulau ke daerah berpenduduk lebih sedikit dan kita ketahui sebagai program transmigrasi, maka dari itu pemerintah melakukan perpindahan Penduduk Jawa, seperti Jawa Barat,

DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah direlokasi ke beberapa pulau. Salah satunya di Sumatera, lebih tepatnya di Riau, Kabupaten Indra Giriful, Kabupaten Singingi, di mana terjadi pergerakan jiwa secara umum. Sistem pertanian sekunder (1KK menerima 2 hektar lahan) (0,25 hektar lahan pemukiman, 1 hektar lahan komersial dan 0,75 hektar lahan komersial tambahan).

Kelompok penduduk yang pertama kali tinggal di desa Muara Bahan pada Maret 1986 ini disebut UPT Tebu Lipat SKPF1 dalam pola trans umum, tetapi diubah menjadi perkebunan kelapa sawit PIR (Perkebunan Inti Rakyat) pada tahun 1989. Saya melakukannya. Kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan PT. SURYA AGROLIKA REKSA (PT. SAR) sebagai ayah angkat karena pola trans umum dinilai kurang berhasil.

Pada tahun 1991, desa persiapan muara bahan (jumlah penduduk 372 KK (kepala keluarga) dan 2.223 jiwa), bersama dengan 4 desa persiapan lainnya dikecamatan Singingi dan desa-desa di 4 kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu resmi diserahkan oleh kepala kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bupati KDH tingkat II Indragiri Hulu pada hari senin tanggal 03 Agustus 1991, berdasarkan dokumen penyerahan yaitu berita acara serah terima Ex. Unit pemukiman transmigrasi/Desa Transmigrasi nomor: BA.096/DT-OD.03a/VIII/1991 tanggal 03 Agustus 1991, yang di tandatangani oleh Drs. Sagiman dan Ruchiyat Saefudin. Pada awalnya Desa Muara Bahan terdiri dari 3 Dusun yaitu :

Dusun Tugu Rejo sebanyak 168 KK

1. Dusun Pelapa Sari sebanyak 172 KK
2. Dusun Kalang Sari sebanyak 168 KK

Pada perkembangan berikutnya jumlah penduduk semakin banyak, sehingga tahun 1994 diadakan pecahan KK sebanyak 75 KK dengan pola trans swakarsa mandiri atau TSM, dan berubah menjadi dusun baru yaitu Dusun Bangun Rejo. Pada masa-masa awal, karena adanya masukan dari beberapa pihak akhirnya ditetapkan menjadi Desa Muara Bahan hingga sekarang.

Pada tahun 1989, Desa Muara Bahan menjadi desa definitif yang di serah terimakan dari departemen Transmigrasi ke pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu, bersama dengan 4 (empat) desa lainnya. Sekarang Desa Muara Bahan merupakan salah satu desa dari 12 desa di Rantau Singingi dengan jumlah penduduk yang paling banyak ke 5 (lima) setelah Desa Sumber Jaya, dan mempunyai letak wilayah yang luas. Desa Muara Bahan terletak di dataran tinggi yang berjarak kurang lebih 20 KM kearah Timur dari kota kecamatan dan mempunyai luas wilayah 2.058,17 Ha.

Wilayah Desa Muara Bahan pada saat ini dibagi dalam 4 (empat) Dusun yaitu:

1. Dusun Kalang Sari
2. Dusun Tugu Rejo
3. Dusun Pelapa Sari
4. Dusun Bangun Rejo

Di setiap Dusun terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, dan perumahan. Sementara pusat pemerintahan seperti Kantor Desa, KUD dan lain-lain berada di Dusun Pelapa Sari dan setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

2. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor desa Muara Bahan jumlah penduduk yang ada di Desa Muara Bahan yaitu berjumlah 3233 jiwa dengan 1669 jiwa penduduk laki-laki dan 1564 jiwa penduduk perempuan.

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muara Bahan

Pemerintahan Desa Muara Bahan adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada camat.

Desa Muara Bahan memiliki Visi dan Misi, yakni :

Visi : “Mewujudkan Muara Bahan menjadi Desa mandiri, pusat perekonomian, dan pendidikan dengan kehidupan yang agamis menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

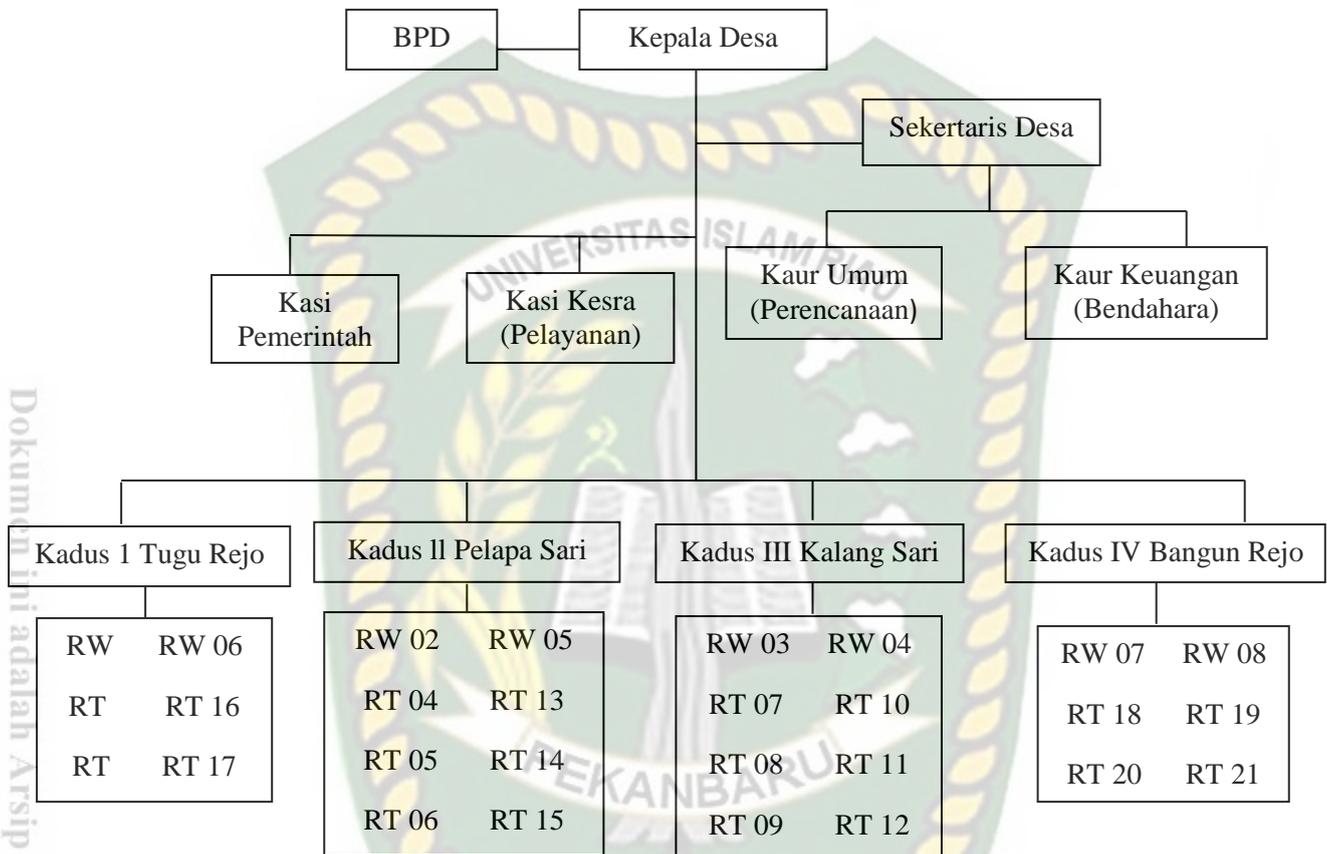
Misi :

1. Menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berupaya bersama-sama menggali dan meningkatkan sumber pendapatan keluarga.
2. Menggerakkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis industri rumah tangga yang murah, bermutu dan bersaing.
3. Memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat dibidang ekonomi, berpendidikan dan keagamaan.

4. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kepedulian, kegotongroyongan antar masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Mengupayakan pembangunan sarana pendidikan umum dan agama, memberi kesempatan pada generasi muda untuk mengabdikan, mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Baik perorangan, kelompok dan lembaga lainnya.
6. Mengupayakan pembangunan sarana perekonomian umum dan masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Memberdayakan peran ulama dalam kehidupan beragama masyarakat.
8. Menggali meningkatkan sumber usaha, potensi dan pendapatan desa untuk kemakmuran bersama

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informen

Dalam suatu penelitian, penting untuk menjelaskan identitas informan dalam penelitian tersebut, karena para pembaca akan merasa lebih yakin tentang apa yang di baca. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan identitas informan peneliti yang berjudul “Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Identitas yang akan penulis jelaskan pada pembahasan ini antara lain yaitu tentang Jenis Kelamin,Usia dan Pendidikan Informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Di dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan selama informan bersedia untuk memberikan jawaban yang benar adanya. Jenis kelamin infoman tidaklah berpengaruh karena jenis kelamin tidak menentukan pola pikir maupun pemahaman dan wawasan dari seseorang pada suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian yang akan penulis teliti ini jenis kelamin informan di dominasi dengan kaum laki-laki. Karena pemahaman masyarakat di lokasi penelitian kenyataannya lebih di miliki oleh kaum laki-laki. Pada penelitian yang berjudul “ Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” ini

informan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 5 (lima). Total seluruh informan pada penelitian ini adalah berjumlah 5 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentu tidak akan memberikan batasan usia informan dalam penelitiannya, tetapi tidak dapat kita pungkiri usia biasanya menentukan kedewasaan dan pola pikir dari seseorang. Pada penelitian ini memiliki beragam usia informannya. Adapun Usia Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel V.I Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	20-29	1
2	30-39	1
3	40-49	2
4	60-79	1
	Jumlah	5

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2022

3. Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan dan sangat berpengaruh untuk proses peningkatan sumber daya manusia. Tentunya semakin tinggi pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir, memiliki wawasan yang luas, dan rasional. Orang yang pendidikannya lebih tinggi akan dengan mudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini.

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP/SLTP	1
3	SMA/SLTA	3
	Jumlah	5

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2022

B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kebijakan merupakan kumpulan dari rancangan dan asas yang menjadi pegangan dan aturan rencana dalam suatu kegiatan, kepemimpinan, dan cara berbuat. Istilah ini biasanya digunakan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut pendapat dari Wahab (2004 : 3) Kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu sehubungan dengan adanya kecacatan tertentu, sambil mencari cara untuk mencapai atau mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat dari Bullock et al (Angga Sahya, Endang Soetari 2014) Untuk dapat disebut sebagai suatu kebijakan, suatu keputusan harus diikuti dengan suatu langkah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep, politik meliputi:

Untuk dapat disebut sebagai suatu kebijakan, suatu keputusan harus diikuti dengan suatu langkah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep, politik meliputi:

- a. Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu.
- b. Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
- c. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan

Untuk melihat Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi maka dari itu penulis akan uraikan sebagai berikut :

1. Ketetapan

Ketetapan merupakan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang mempunyai hokum tata usaha negara yang di dasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang bersifat individu atau pribadi. Dalam melaksanakan Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengenai Ketetapan penulis melakukan wawancara pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Suryono selaku SEKDES/Sekertaris Desa di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Bagaimana aturan dalam pembagian tugas di pembangunan pasar

“Aturan Tugas di Pembangunan, aturan tugas di pembangunan Pasar Desa mengacu kepada peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah kita melalui TPK (Time Pelaksana Kegiatan) yang di tunjuk oleh kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunannya kemudian di bawa oleh kaur pembangunan yang ada di desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa aturan yang di gunakan mengacu pada aturan yang sudah ada dan kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan dan kaur pembangunan yang ada didesa.

- b. Apa saja langkah-langkah dari adanya pembangunan pasar ini

“Langkah-langkah yang di lakukan, yang pertama tentunya di bahas melalui rencana kerja pemerintah desa atau RKPDES tahun berjalan kemudian di matangkan di anggaran pendapatan belanja desa yang mana pembangunan tersebut terletak pada bidang pemberdayaan ekonomi desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa langkah yang di ambil dibahas dalam rencana kerja pemerintah desa dan pembangunan pasar ini terletak pada bidang pemberdayaan ekonomi desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Ridwan Rantoni selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai pembangunan pasar

“Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi, menurut saya melalui musyawarah bersama warga dan lembaga (MURDES) Pada tanggal 17 Maret 2021”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sosialisasi bersama masyarakat yang dilakukan berdasarkan MURDES, Yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2021.

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan mengenai pembangunan pasar

“Tanggapan mengenai pembangunan pasar menurut saya dengan adanya pembangunan pasar di desa Muara Bahan bagus dan efektif, sebab bisa mendongkrak ekonomi masyarakat dan desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dari adanya pembangunan pasar yang dilakukan dapat membantu perekonomian masyarakat maupun perekonomian desa.

- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembangunan pasar

“Mengetahui tentang adanya pembangunan pasar, menurut saya pembangunan pasar sudah berjalan karena kepala desa sudah memberitahu adanya pembangunan pasar tersebut.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kepala desa sudah memberitahu mengenai pembangunan pasar ini.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Budiono selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai pembangunan pasar

“Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi menurut bapak untuk sosialisasi masih kurang maksimal dan masih banyak

masyarakat yang kurang setuju mengenai pembangunan pasar ini melihat tempatnya yang jauh”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat masih kurang maksimal dan masyarakat masih banyak yang kurang setuju mengenai pembangunan pasar ini.

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan mengenai pembangunan pasar

“Tanggapan mengenai pembangunan pasar menurut bapak untuk pembangunan bagus untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya pembangunan pasar, cuma ya itu tadi tempat juga harus di tinjau strategis atau tidak.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pembangunan pasar yang di lakukan cukup bagus dan akan meningkatkan perekonomian.

- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembangunan pasar

“Mengetahui tentang adanya pembangunan pasar, menurut saya mengetahui untuk pembangunan dan pernah mengecek kelapangan langsung saya sebagai BPD memang harus mengecek juga untuk pembangunan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah desa maupun kepala desa sudah memberitahu tentang pembangunan pasar yang ada di desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang di lakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Sudakir sebagai informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai pembangunan pasar

“Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi menurut bapak sudah bagus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sosialisasi yang di berikan sudah cukup bagus.

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan mengenai pembangunan pasar

“Tanggapan mengenai pembangunan pasar menurut bapak bagus juga dan bisa meningkatkan perekonomian warga.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa di dalam pembangunan ini memang sudah bagus dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembangunan pasar

“Mengetahui tentang adanya pembangunan pasar, menurut saya belum tahu yang saya tahu itu kalau pembangunan pasar itu di tanah desa bagus seumpama ada pembesaran atau pembangunan bantuan dari atasan karena tanah itu milik desa bukan milik pribadi jadi bagus untuk ketetapan pasar itu.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tidak semua warga tau mengenai pembangunan pasar yang ada di desa

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Bapak M. Agus Rahmadi selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai pembangunan pasar

“Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi menurut saya pemerintahan desa cukup bagus dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa melihat dari hasil wawancara pemerintah desa sudah cukup bagus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan mengenai pembangunan pasar

“Tanggapan mengenai pembangunan pasar, menurut saya mengenai pembangunan pasar cukup membantu perekonomian masyarakat.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pembangunan yang di lakukan cukup bagus dan dapat meningkatkan perekonomian.

- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembangunan pasar

“Mengetahui tentang adanya pembangunan pasar, menurut saya saya mengetahui tentang adanya pembangunan pasar ini.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sudah mengetahui tentang pembangunan pasar yang ada di desa

2. Tujuan

Tujuan merupakan hal yang ingin di capai atau hasil dari suatu organisasi/kelompok. Tujuan yang berbentuk sasaran bersifat kualitatif dan merupakan pencapaian dari bentuk keberhasilan kinerja suatu organisasi atau kelompok. Dalam melaksanakan Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengenai Tujuan penulis melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Suryono selaku SEKDES/Sekertaris Desa di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

a. Apakah tujuan dari pembangunan pasar

“Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk membuat suatu wadah ekonomi untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di desa sehingga bisa terhimpun terpantau dan terbina.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tujuan yang bisa di lihat adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa dan membantu perekonomian desa.

b. Bagaimana mekanisme tujuann perencanaan pembangunan pasar.

“Mekanisme tujuan perencanaan pembangunan, mekanismenya mengacu pada peraturan yang sudah ada (no 2 tahun 2021 indeks

pembangunan pasar) tentunya diawali dengan musyawarah desa, di musyawarah desa itu ada beberapa tahapan dari mulai musyawarah desa RKPDES musyawarah desa APBDES dan tentunya musyawarah pengesahan APBDES.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tujuan perencanaan berpedoman pada peraturan yang sudah ada dan melakukan musyawarah desa.

- c. Apakah dengan adanya pasar ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat

“Apakah dengan adanya pasar membuka lapangan kerja, iya pastinya insyaallah seperti itu karena pasar adalah tempat interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli yang secara otomatis akan muncul suatu pekerjaan atau pendapatan warga desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah desa menginginkan dengan adanya pembangunan pasar ini dapat mengubah dan menambah penghasilan masyarakat yang ada di desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Ridwan Rantoni selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pembangunan pasar ini akan menambah kesejahteraan masyarakat.

“Apakah pembangunan pasar akan menambah kesejahteraan, menurut saya tentu iya sebab peluang masyarakat untuk berkontribusi atau berpartisipasi di dalam pengelolaan pasar nantinya.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan pasar desa.

- b. Menurut Bapak/ Ibu apakah dengan adanya pembangunan pasar ini akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan

“Apakah pembangunan pasar mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menurut saya benar sekali dengan adanya pembangunan pasar ini akan lebih mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dengan adanya pasar di desa dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di butuhkan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Budiono selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pembangunan pasar ini akan menambah kesejahteraan masyarakat

“Apakah pembangunan pasar akan menambah kesejahteraan, menurut saya jelas menambah kesejahteraan masyarakat terutama dari perekonomian yang tadi itu otomatisakan banyak nanti dari masyarakat yang di utamakan dari masyarakat di Desa Muara Bahan dulu silahkan yang mau berjualan nanti baru dari orang luar.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dapat menambah penghasilan masyarakat dan juga membantu perekonomian bagi masyarakat.

- b. Menurut Bapak/ Ibu apakah dengan adanya pembangunan pasar ini akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan

“Apakah pembangunan pasar mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menurut saya jelas dan sudah pasti untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan yang tadinya harus pasar ke desa-desa

tetangga dengan adanya pembangunan pasar ini manfaatnya jelas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa memang benar dengan adanya pembangunan pasar masyarakat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak perlu jauh-jauh ke desa-desa tetangga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Sudakir selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pembangunan pasar ini akan menambah kesejahteraan masyarakat

“Apakah pembangunan pasar akan menambah kesejahteraan, menurut bapak ya sudah betul untuk menambah kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Bahan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa memang benar dengan adanya pembangunan pasar yang ada untuk menambah masyarakat sejahtera.

- b. Menurut Bapak/ Ibu apakah dengan adanya pembangunan pasar ini akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan

“Apakah pembangunan pasar mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menurut bapak sudah pasti untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan warga di Desa Muara Bahan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kebutuhan masyarakat desa lebih mudah di dapat karena sudah adanya pasar desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Bapak M. Agus Rahmadi selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pembangunan pasar ini akan menambah kesejahteraan masyarakat

“Apakah pembangunan pasar akan menambah kesejahteraan, menurut saya iya jelas akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat atau warga desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa memang benar dengan adanya pembangunan pasar yang ada untuk menambah masyarakat sejahtera.

- b. Menurut Bapak/ Ibu apakah dengan adanya pembangunan pasar ini akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan

“Apakah pembangunan pasar mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menurut saya iya tentu akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan untuk masyarakat.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kebutuhan masyarakat desa lebih mudah di dapat karena sudah adanya pasar desa.

3. Keputusan

Keputusan merupakan suatu ujung dari hasil yang di musyawarahkan kelompok atau organisasi. Keputusan juga diambil untuk menentukan langkah-langkah yang efektif didalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam Negara demokratis dan Indonesia merupakan salah satunya yang sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya, maka dari itu seorang pemimpin (baik di tingkat daerah provinsi/ kabupaten) haruslah

melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Dalam melaksanakan Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengenai Keputusan penulis melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Suryono selaku SEKDES/Sekertaris Desa di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Apakah keputusan peraturan kepala desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan pasar

“Apakah keputusan kepala desa sangat berpengaruh, menurut saya iya pembangunan pasar bisa di lakukan mana kala ada keputusan kepala desa karena untuk tingkatan di desa tertinggi adalah keputusan APBDES yang di dampingin juga oleh keputusan kepala desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kepala desa yang membuat keputusan dan memberikan keputusan untuk setiap apa pun yang ada di desa karena kepala desa adalah pemegang tertinggi keputusan yang ada di desa.

“Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Ridwan Rantoni selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Apakah menurut Bapak/Ibu Kepala Desa sudah memberitahu tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam pembangunan pasar

“Apakah kepala desa memberitahu keputusan yang sudah diambil, menurut saya iya kepala desa memang sudah memberitahukan tentang keputusan-keputusan yang di ambil untuk pembangunan pasar ini.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kepala desa memang sudah memberitahu tentang keputusan-keputusan yang di ambil untuk pembangunan pasar.

- b. Apa saja keputusan yang Bapak/Ibu ketahui dalam pembangunan pasar yang diberikan oleh Kepala Desa

“Apa saja keputusan yang di ketahui, menurut saya intinya keputusan kepala desa dalam pembangunan pasar ini ingin mendongkrak atau meningkatkan perekonomian di desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dari keputusan kepala desa tentunya berharap bisa meningkatkan perekonomian desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Budiono selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Apakah menurut Bapak/Ibu Kepala Desa sudah memberitahu tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam pembangunan pasar

“Apakah kepala desa memberitahu keputusan yang sudah diambil, menurut bapak iya kepala desa sudah ada keputusannya dan sudah di sampaikan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sudah menyampaikan keputusan yang di ambil untuk pembangunan pasar.

- b. Apa saja keputusan yang Bapak/Ibu ketahui dalam pembangunan pasar yang diberikan oleh Kepala Desa

“Apa saja keputusan yang di ketahui, menurut bapak mengenai keputusan yang di ketahui saya kurang tahu soal itu.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa keputusan dari kepala desa tidak semua masyarakat tahu mengenai keputusan yang diberikan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Sudakir selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Apakah menurut Bapak/Ibu Kepala Desa sudah memberitahu tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam pembangunan pasar

“Apakah kepala desa memberitahu keputusan yang sudah diambil, menurut bapak sudah diberitahu tapi masih kurang jelas.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa keputusan dari kepala desa tidak semua masyarakat tahu mengenai keputusan yang diberikan.

- b. Apa saja keputusan yang Bapak/Ibu ketahui dalam pembangunan pasar yang diberikan oleh Kepala Desa

“Apa saja keputusan yang di ketahui, menurut saya iya itu tadi kalau tanah itu milik desa sewaktu-waktu ada pembangunan atau bantuan dari atasan cocok untuk ditempatkan di pasar milik desa itu kalau pribadi tetep tidak cocok.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tanah desa bagus untuk di bangun pasar desa karena memang di desa Muara Bahan belum mempunyai pasar desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Bapak M. Agus Rahmadi selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Apakah menurut Bapak/Ibu Kepala Desa sudah memberitahu tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam pembangunan pasar

“Apakah kepala desa memberitahu keputusan yang sudah diambil, menurut bapak sudah kepala desa sudah memberi tahu tentang keputusan yang di ambil dalam pembangunan pasar.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sudah menyampaikan keputusan yang di ambil untuk pembangunan pasar.

- b. Apa saja keputusan yang Bapak/Ibu ketahui dalam pembangunan pasar yang diberikan oleh Kepala Desa

“Apa saja keputusan yang di ketahui, menurut saya pembangunan pasar diambil dana APBD desa (anggaran pendapatan belanja desa).”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa untuk dana yang di gunakan dalam pembangunan ini merupakan dana dari anggaran pendapatan belanja desa.

4. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan merupakan tahap dimana dan kapan, bagaimana beserta kegiatan suatu kelompok di selenggarakan, sehingga

pelaksanaannya bisa di sebut dengan proses kegiatan melibatkan semua sumber daya manusia, dan semua dana maupun sarana sesuai dengan pedoman, waktu dan tempat yang telah di tetapkan. Dalam melaksanakan Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengenai Proses Pelaksanaan penulis melakukan wawancara pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Suryono selaku SEKDES/Sekretaris Desa di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang ada di dalam pembangunan pasar

“Proses pelaksanaan pengawasan, pengawasan dalam pembangunan pasar tentunya di internal desa itu ada BPD (badan pengawas desa) kemudian ada pendamping desa baik tingkat kecamatan juga pendamping desa dari kabupaten atau TA (tenaga ahli) kabupaten yang mengawasinya.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa BPD sebagai pengawas jalannya kegiatan pembangunan dan ada pendamping desa, kecamatan, dan pendamping dari kabupaten.

- b. Apa saja pendekatan yang dilakukan antara aparat desa kepada masyarakat mengenai pembangunan pasar

“Pendekatan yang di lakukan antara aparat desa, tindakan yang di lakukan oleh pemerintah desa pendekatannya adalah mensosialisasikan bahwa pentingnya memiliki pasar yang di akui oleh dinas pasar itu sendiri sehingga dalam aktifitas di dalamnya itu menghindari terjadinya pungutan liar, menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpantau oleh pemerintah.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa aparat desa memberitahu tentang pentingnya memiliki pasar desa yang di akui oleh dinas pasar.

- c. Apakah Kepala Desa mempunyai peran penting terhadap partisipasi masyarakat

“Kepala desa mempunyai peran penting terhadap partisipasi, sangat sekali kepala desa memiliki peran penting karena memang salah satu tugas kepala desa adalah membina, mengayomi dari semua bidang yang ada di desa baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan bidang penanggulangan bencana.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa salah satu tugas kepala desa adalah membina mengayomi dari semua bidang yang ada di desa.

“Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Bapak Ridwan Rantoni selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana waktu dalam pengerjaan pembangunan pasar

“Waktu dalam pengerjaan pembangunan, menurut saya sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pembangunan yang di lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh kepala desa dan jajarannya.

- b. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan yang ada di desa Muara Bahan

“Pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan, menurut saya lebih kurangnya perangkat atau pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menerapkan pembangunan termasuk pembangunan pasar desa.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dari segi pembangunan pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menerapkannya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Budiono selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa :

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana waktu dalam pengerjaan pembangunan pasar

“Waktu dalam pengerjaan pembangunan, menurut bapak kalau untuk masalah ini sudah bagus terutama memang untuk meningkatkan perekonomian.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa di dalam pengerjaan pembangunan pasar ini sudah bagus.

- b. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan yang ada di desa Muara Bahan

“Pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan, menurut saya sudah maksimal dan dengan dana yang ada.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembangunan secara maksimal untuk membuat desa Muara Bahan lebih maju dan sejahtera.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak Sudakir selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana waktu dalam pengerjaan pembangunan pasar

“Waktu dalam pengerjaan pembangunan, menurut saya yang saya lihat dalam pengerjaannya ada gotongroyong juga tapi belum jelas.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa adapun waktu dalam pengerjaan ada yang belum jelas.

- b. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan yang ada di desa Muara Bahan

“Pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan, Menurut saya kalau yang saya lihat pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembangunan secara maksimal untuk membuat desa Muara Bahan lebih maju dan lebih sejahtera.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Bapak M. Agus Rahmadi selaku informan di Desa Muara Bahan mengatakan bahwa:

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana waktu dalam pengerjaan pembangunan pasar

“Waktu dalam pengerjaan pembangunan, menurut saya waktu dalam pengerjaan tidak begitu lama.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa waktu dalam pengerjaan memang tidak begitu lama.

- b. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan yang ada di desa Muara Bahan

“Pemerintah desa sudah maksimal dalam menerapkan pembangunan, menurut saya pemerintah desa sudah cukup maksimal dalam menerapkan pembangunan.”

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembangunan secara maksimal untuk membuat desa Muara Bahan lebih maju dan lebih sejahtera.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan key informan dan informan mengenai Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar di Desa Muara Bahan, masih di temukan hambatan dalam pelaksanaannya, adapun faktor penghambat tersebut sebagai berikut :

1. Masih kurang maksimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat maka dari itu masih banyak masyarakat yang belum setuju tentang adanya pembangunan pasar desa ini.
2. Kurang optimalnya pemerintah desa memberikan waktu dalam pengerjaan pembangunan yang di lihat dalam pengerjaannya ada gotongroyong juga tapi belum jelas.

3. Kurang optimalnya kepala desa dalam memberitahukan tentang keputusan-keputusan yang sudah di ambil untuk pembangunan pasar desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” maka penulis akan mengambil kesimpulan dengan adanya pembangunan pasar desa ini akan menambah kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya pasar desa di harapkan dapat menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian masyarakat juga perekonomian desa, pemerintah desa juga berharap masyarakat bisa dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan tidak semua pihak masyarakat setuju dengan adanya pembangunan pasar yang di lakukan karena lokasi yang masih kurang bagus.

Melalui penelitian ini juga dapat di ketahui mengenai hambatan-hambatan dalam Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Masih kurang maksimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat maka dari itu masih banyak masyarakat yang belum setuju tentang adanya pembangunan pasar desa ini.
2. Kurang optimalnya pemerintah desa memberikan waktu dalam pengerjaan pembangunan yang di lihat dalam pengerjaannya ada gotongroyong juga tapi tidak begitu jelas.

3. Kurang optimalnya kepala desa dalam memberitahukan tentang keputusan-keputusan yang sudah di ambil untuk pembangunan pasar desa.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti sebagai masukan mengenai Analisis Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Pasar Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah desa khususnya kepala desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang kurang sejutu dengan adanya pembangunan pasar bisa mengetahui maksud dan tujuan dari pembangunan pasar desa.
2. Disarankan kepada pemerintah desa agar lebih melihat dan menjelaskan waktu dalam pengerjaan sehingga masyarakat pun tahu mengenai waktu untuk pembangunan yang di lakukan.
3. Disarankan Kepada masyarakat di Desa Muara Bahan untuk bekerjasama dengan merubah cara pandang mengenai pembangunan pasar yang di lakukan karena semata-mata juga utuk menambah kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKAN

Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik*, Aceh : Salembahumanika
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta : Grasind.
- Angga Sahya, Endang Soetari. 2014. *Kebijakan publik*, Bandung : Pustaka Setia
- Arenawati. 2014. *Andimistrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Bratakusumah & Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2010. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendi, Bactiar. 2002. *Pembangunan, Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta : Uhindo Dan Offset
- Indriati, Etty. 2013. *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*, Jakarta : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Joessron, Tati Suharti. 2003. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : Salemba Empat
- John W, Creswell. 2010. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kansil dan Cristine. 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Gravika
- _____ 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta : Rajawali Pers
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Morissan, A M. Dkk. 2017. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Kencana
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*, Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makasar : Garis Khatulistiwa
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Keybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 2*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi Ilmu Pengetahuan Baru*, Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 2001. *Kybernologi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nizaruddin. 2013. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Idea Sejahtera
- Nugroho, I. & Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES
- Rauf, Rahyunir. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru : Zanafa Publishing
- Riyadi & Bratakusuma. 2005. *Peran Masyarakat Dalam Pembangunan*, Jakarta : Multigrafika

- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi & Strateginya* Jakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo
- Solihin, D. 2006. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Jakarta : Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara
- Solihin & Bratakusumah . 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- _____. 2011. *Analisi Kebijakan Publik, (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sudjana, N. 2004. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung : Rosda
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2011. *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama
- _____. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Penerbit Yogyakarta
- Thair, wisistiono. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media
- _____ 2006. *Pembanguanna Desa*, Jakarta : Fokus Media
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Wahab, Sholichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan:dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan nagara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Widjaja. HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Widiono, & Sofar Silaen. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : IN MEDIA
- Yuwono, Teguh. 2001. *Menejemen Otonomi Daerah*, Semarang : Poskodak

Jurnal

- Agus, Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, Malang : Universitas Malang
- Alfianita, Ella, Andy Feta Wijaya, Siswidiyanto. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*. Vol 3.No 5, Hal. 758-762.
- Anwar Misbahul dan Bambang Jatmiko, 2012, *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ISSN : 1978-1679

Dewi, Ni Komang Devayanti. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan*. Universitas Udayana. Bali. Vol 14, No1.

Hakim, Abdul. 2017. *Analisis Pengaruh Pembangunan Pasar Sanggam Aji Dilayas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Gunung Tabur Kabupaten Berau*. Vol 1. No 1

Maulidiah, Sri. 2014. *Kajian Ilmu Pemerintahan* (43-53)

Toyibah, Ina Laelatu. 2018. *Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Patikraja, Kec. Patikraja, Kab Banyumas)* IAIN Purworejo.

Safitri, Ristya Arinta. 2014. *Pembangunan Pasar VS Komunitas*. Vol 14. No 2

Wikipedia 2014 (id.wikipedia.org).

Dokumen

Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan